

PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI PENINGKATAN KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN PERANCIS TAHUN 2017-2022

Faizal Muslimin Kalam¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia menghadapi berbagai ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memerlukan sistem pertahanan yang tangguh. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara untuk memperkuat kapabilitas militernya. Kerja sama dengan Perancis, yang dimulai sejak tahun 1996 melalui berbagai perjanjian, termasuk *Memorandum of Understanding (MoU)* di bidang pertahanan, telah berkembang pesat dan berperan penting dalam modernisasi alutsista dan teknologi pertahanan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Perancis selama periode tersebut berkontribusi pada pencapaian target *Minimum Essential Force (MEF)*, memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia, dan mempererat hubungan diplomatik kedua negara dalam konteks keamanan regional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui peningkatan kerja sama pertahanan dengan Perancis pada periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan teori Neorealisme dan konsep Kepentingan Nasional untuk menganalisis peningkatan kerja sama tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan laporan terkait.

Kata Kunci : Kepentingan Nasional, Indonesia, Perancis, Pertahanan

ABSTRACT

Indonesia faces various traditional and non-traditional security threats, both from within and outside the country, which require a strong defense system. With the principle of free and active foreign policy, Indonesia establishes defense cooperation with various countries to strengthen its military capabilities. Cooperation with France, which began in 1996 through various agreements, including a Memorandum of Understanding (MoU) in the defense sector, has grown rapidly and plays an important role in the modernization of Indonesia's defense equipment and technology. The results show that defense cooperation between Indonesia and France during this period contributed to the achievement of the Minimum Essential Force (MEF) target, strengthened Indonesia's defense capabilities, and strengthened the diplomatic relations between the two countries in the context of regional and international security. This study aims to analyze the achievement of Indonesia's national interests through increased defense cooperation with France in the 2017-2022 period. This research uses Neorealism theory and the concept of National Interest to analyze the increased cooperation. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, where data is collected through literature studies, official documents, scientific articles, and related reports.

Keywords: National Interest, Indonesia, France, Defense

PENDAHULUAN

Keamanan saat ini telah menjadi isu penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara dalam dinamika dunia internasional. Keamanan sendiri merupakan salah satu tujuan dari kepentingan nasional suatu negara, yang dijadikan sebagai symbol kedaulatan dan kebanggaan dari harga diri negara tersebut. Setiap negara mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri secara mandiri, namun ada beberapa negara yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, negara-negara di dunia memerlukan bantuan negara lain untuk menjamin keamanannya dan meningkatkan sektor keamanan dan pertahanannya. Untuk memperkuat keamanan dan pertahanan masing-masing negara, Anda dapat bersama-sama membantu negara lain untuk meningkatkan sektor keamanan dan pertahanannya. (Situmorang, 2015)

Kerja sama keamanan dan pertahanan merupakan salah satu bentuk hubungan internasional. Hubungan internasional melibatkan kerjasama internasional, yaitu kerjasama kepentingan global antara seluruh negara di dunia atau mayoritas negara di dunia. Kerja sama internasional berlangsung di beberapa organisasi internasional di seluruh dunia dan mencakup semua bidang, termasuk kerja sama keamanan dan pertahanan. Sehingga, dalam situasi di mana dua negara besar mempunyai kekhawatiran keamanan yang sama, kerja sama militer merupakan sebuah hasil yang potensial. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan

17.508 pulau dan populasi 273,8 juta jiwa pada 2021, memiliki posisi strategis antara dua benua dan samudra, yang memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi kedaulatan negara. Ancaman keamanan datang baik dari dalam, seperti gerakan separatistis dan terorisme, maupun dari luar, seperti pelanggaran batas wilayah, spionase, dan pemberontakan bersenjata. Untuk mengatasi ancaman ini, Indonesia menekankan pentingnya sistem pertahanan yang kuat melalui peningkatan kerja sama internasional. Dalam buku putih Kementerian Pertahanan, Indonesia menargetkan peningkatan kualitas alutsista dan sumber daya manusia guna mencegah konflik dan memperkuat keamanan. Kebijakan *Minimum Essential Forces (MEF)*, yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2010, bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan tanpa melibatkan perlombaan senjata. MEF berfokus pada strategi rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan,

serta kerja sama pertahanan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Turki, Jepang, dan Perancis.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis telah terjalin sejak tahun 1950, dan hubungan kedua negara terus membaik, terbukti dengan banyaknya perjanjian kerja sama di berbagai bidang. Membaiknya hubungan Indonesia-Perancis pada ditandai dengan kunjungan pejabat nasional pada konferensi bilateral dan multilateral, serta saling mendukung dalam kegiatan nominasi di organisasi internasional. Tidak hanya itu, terjalannya hubungan bilateral antar kedua negara ini dilandasi dengan adanya kesamaan prinsip dalam sistem politik luar negeri yang dianut Indonesia dan Perancis menjadi faktor pendukung semakin kuatnya hubungan kedua negara. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. tidak terikat pada kekuasaan tertentu. Sedangkan sistem politik Perancis yang independen saat ini berlaku di Perancis yaitu *Politique Independence France* dimana warga negara mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip inilah yang menjadi dasar terjalannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Perancis. (Rani Mardhika, 2023)

Sejak 1996, Memorandum of Understanding (MoU) di bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan telah ditandatangani antara Indonesia dan Perancis, dan hubungan kedua negara terus berkembang. Bagi Perancis, Indonesia adalah mitra strategis dalam menjaga keamanan Indo-Pasifik sebagai zona ekonomi global, serta sebagai salah satu pendiri ASEAN yang berperan penting di Asia Tenggara dan Pasifik. Bagi Indonesia, kerja sama ini merupakan peluang untuk memperkuat kemampuan pertahanan di berbagai bidang. (Foi, 2002)

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Perancis dimulai pada 1996 dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai peralatan, logistik, dan industri pertahanan. Pada 2012, kedua negara memperluas kerja sama ini dengan kesepakatan terkait pengembangan industri pertahanan, dialog strategis, pertukaran intelijen, dan operasi penjaga perdamaian. Selain itu, dibentuk *forum Indonesia-French Defense Dialogue (IFDD)* yang mencakup tiga kelompok kerja: *Military Cooperation, Strategic Views, dan Defence Industry*. (Rani Mardhika, 2023)

Di tahun 2020, Menteri Pertahanan Indonesia melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan Perancis untuk merayakan 70 Tahun Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Perancis. Kedua Menteri tersebut membahas mengenai Perkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Perancis. melalui penguatan sistem alutsista TNI dan pemajuan industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun berikutnya, terjadi penandatanganan kesepakatan mengenai Persetujuan Kerja Sama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia-Perancis. Tujuan adanya kerjasama tersebut guna memperluas jangkauan kerja sama pertahanan Indonesia dan Perancis di berbagai bidang seperti Pendidikan serta pelatihan milite, pertukaran ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang industry pertahanan, kerja sama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industry pertahanan termasuk produksi Alutsista secara Bersama. (Rani Mardhika, 2023)

Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan Perancis untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan. Kerjasama ini berfokus pada Transfer of Technology (TOT), yang memungkinkan Indonesia mengakses teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista sesuai dengan standar *Minimum Essential Force* (MEF). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan, kapasitas industri, dan peluang kolaborasi internasional.

Program MEF Indonesia dimulai pada 2010 dengan tahapan yang direncanakan hingga 2029. Saat ini, Indonesia berada di tahap III (2020-2024) dengan target MEF mencapai 100% pada akhir 2024. Namun, capaian MEF pada tahap I dan II masih di bawah target, yaitu 54,97% dan 63,19% masing-masing. Faktor utama keterlambatan adalah proses perencanaan dan pengadaan yang memakan waktu lama. Capaian MEF per cabang angkatan bervariasi: TNI AD mencapai 78,82%, TNI AL 67,57%, dan TNI AU 45,19%. (PAL, 2019)

Kerja sama Indonesia dan Perancis dalam sektor pertahanan sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti **Bagaimana Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia dalam meningkatkan Kerjasama Pertahanan dengan Perancis Pada Tahun 2017-2022?** Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan, menganalisis langkah-langkah pemenuhan, serta kelebihan dan kekurangan dalam

kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis, serta kepentingan Indonesia dalam peningkatan kerjasama tersebut. penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian berjudul “Kerjasama Industri Pertahanan Melalui Pengadaan Jet Rafale Untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia” yang membahas pentingnya alutsista yang handal dalam pertahanan nasional dan judul “Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis Dalam Memenuhi *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019” oleh Utaryo Snatiko dan Maria Davina Agustien, yang ditulis oleh Utaryo Snatiko dan Maria Davina Agustien. Artikel ini membahas efektivitas kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Prancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force (MEF)* TNI selama periode 2015-2019.

Serta yang terakhir artikel dengan judul “Kepentingan Indonesia Dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Perancis (Studi Kasus: Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale Tahun 2020-2022)” oleh Rani Mardhika, Christian Herman Johan De Fretes, dan Triesanto Romulo Simanjuntak membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis yang dimulai pada 2021 dengan fokus pada pembelian pesawat tempur Dassault Rafale. Penelitian ini menerapkan teori Neorealisme dan konsep Kepentingan Nasional untuk menganalisis peningkatan kerja sama tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan laporan terkait.

PEMBAHASAN

Kebijakan dan Sistem Pertahanan Indonesia

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan sistem pertahanan Indonesia, serta strategi nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Indonesia mengadopsi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, alam, dan buatan secara menyeluruh. Sistem ini mengintegrasikan pertahanan militer dan nonmiliter untuk menghadapi ancaman aktual, seperti pandemi, terorisme, dan konflik regional, serta ancaman potensial seperti perang konvensional dan kelangkaan sumber daya. Tujuan pertahanan negara adalah melindungi kedaulatan dan keselamatan

bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, melalui lima sasaran strategis utama: mencegah ancaman, mengalahkan agresi militer, mengatasi ancaman yang merusak keberadaan Indonesia, menangani ancaman non-militer, dan berkontribusi pada keamanan regional dan internasional.

Indonesia berusaha membangun sistem pertahanan yang kuat dan tangguh untuk melindungi kedaulatan, keselamatan nasional, dan berkontribusi pada stabilitas global. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem ini, dengan tugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, serta berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. Sistem pertahanan juga melibatkan komponen cadangan yang mencakup warga negara, sumber daya alam, buatan, dan fasilitas nasional, yang dipersiapkan untuk mendukung komponen utama dalam situasi darurat. Persiapan melibatkan pelatihan dan pengorganisasian untuk kesiapan operasional. Sistem pertahanan yang bersifat defensif aktif ini meliputi diplomasi, politik luar negeri bebas aktif, serta pembangunan sistem pertahanan universal dan berlapis. Terdapat tiga fungsi utama dari sistem pertahanan: penangkalan untuk mencegah ancaman, respons untuk mengatasi ancaman yang sudah terjadi, dan pemulihan kondisi keamanan setelah ancaman. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan aman yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran bangsa.

Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara menetapkan strategi untuk memperkuat struktur pertahanan dan meningkatkan kapasitas nasional Indonesia menghadapi ancaman. Fokus utama adalah memastikan pertahanan negara dapat berfungsi optimal dalam berbagai situasi. Pembangunan Sistem Pertahanan Negara bertujuan mengembangkan sistem pertahanan yang terintegrasi dan efektif, mencakup komponen utama dan cadangan untuk menciptakan struktur yang solid dan harmonis. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara mengatur prosedur pengerahan kekuatan untuk merespons ancaman secara cepat dan efisien. Kebijakan Regulasi Pertahanan memastikan semua tindakan dan kebijakan pertahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Minimum Essential Force (MEF)* bertujuan membangun kekuatan TNI yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dan menghadapi ancaman.

Prinsip-prinsip *Minimum Essential Force (MEF)* meliputi beberapa aspek penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Threat-Based Design memastikan relevansi kekuatan dengan ancaman nyata. Capability-Based Defense menekankan kemandirian, mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Anggaran Sesuai Ekonomi memastikan anggaran realistis dan sesuai kapasitas ekonomi. Deterrence Factor bertujuan menciptakan kekuatan penghalang yang efektif. Tahapan pembangunan MEF TNI terdiri dari tiga fase: Tahap I (2010-2014) sebagai fondasi dasar, Tahap II (2015-2019) untuk pengembangan kapabilitas, dan Tahap III (2020-2024) sebagai fase penyelesaian. Strategi pembangunan MEF meliputi Revitalisasi alutsista, Rematerialisasi material, Relokasi fasilitas, dan Pengadaan serta Penghapusan peralatan. Kapabilitas pertahanan Indonesia menunjukkan peningkatan anggaran dari Rp 106,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 127,35 triliun pada 2020, meski masih di bawah target ideal 2,5% dari PDB. Dengan 800.000 personel dan modernisasi alutsista mencapai 63,19% dari target MEF, kapabilitas pertahanan mendukung diplomasi negara, kebijakan luar negeri, dan posisi Indonesia dalam perundingan internasional. (*Buku Putih Pertahanan Indonesia*, n.d.)

Kebijakan dan Sistem Pertahanan Prancis

Sistem dan Kebijakan Pertahanan Prancis fokus pada penguatan kedaulatan dan keamanan nasional serta kontribusi pada keamanan internasional. Prancis mengimplementasikan kebijakan pertahanan komprehensif dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan memperkuat posisi strategisnya. Negara ini mengembangkan kekuatan militer modern, berinvestasi dalam teknologi mutakhir, dan menerapkan prinsip kemandirian strategis, memastikan kapasitas untuk bertindak secara mandiri dalam menghadapi ancaman.

Secara internasional, Prancis aktif dalam operasi perdamaian, misi militer multilateral, dan kerjasama pertahanan kolektif, berkomitmen pada aliansi seperti NATO. Pendekatan ini mencerminkan peran Prancis dalam stabilitas global, melindungi kedaulatan sekaligus berkontribusi pada keamanan internasional.

Sistem Pertahanan Prancis didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membentuk fondasi strategi dan operasionalnya. Kemerdekaan menjadi prinsip utama, menekankan bahwa Prancis harus dapat menjaga keamanan nasionalnya tanpa bergantung pada negara lain. Kelengkapan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh sektor

kehidupan, termasuk sipil, ekonomi, dan militer, dalam upaya pertahanan, memastikan bahwa semua aspek masyarakat berkontribusi terhadap keamanan negara. Prinsip Keabadian memastikan bahwa struktur pertahanan tetap aktif dan siap menghadapi ancaman meskipun dalam kondisi damai, menjaga kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Kesatuan menegaskan bahwa pertahanan nasional harus dikoordinasikan secara efektif oleh pemerintah pusat, untuk memastikan konsistensi dan efektivitas strategi di seluruh negara. Sedangkan Dekonsentrasi mengatur distribusi tanggung jawab pertahanan ke tingkat regional, memungkinkan respons yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap ancaman spesifik di berbagai daerah. Prinsip-prinsip ini secara keseluruhan mendukung pendekatan Prancis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dengan cara yang mandiri, menyeluruh, dan terkoordinasi. (Armées, 2023)

Sistem pertahanan Prancis terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Garda Nasional, dan Gendarmeri Republik Prancis, semuanya berada di bawah komando Presiden Prancis. Prancis memiliki anggaran pertahanan yang sangat besar, menduduki peringkat kedelapan global dengan anggaran 50,1 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 52,7 miliar dolar AS pada tahun 2020. Anggaran ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kapasitas pengeluaran militer, mendukung pertumbuhan ekonomi serta respons terhadap isu keamanan. Dari 1980 hingga 1990, anggaran pertahanan Prancis meningkat rata-rata 1,8% per tahun. (Vincent, 2023)

Pasca Perang Dingin, anggaran pertahanan Prancis mengalami penurunan tahunan sebesar 1,8%, mencerminkan periode stabilitas internasional. Namun, sejak 2001, anggaran meningkat seiring dengan kebijakan untuk memperkuat persenjataan konvensional dan profesionalisme militer, terutama terkait keterlibatan dalam operasi internasional seperti di Afghanistan, Libya, dan Kosovo. Prancis menempati peringkat keenam global dalam kekuatan militer dengan lebih dari 304 ribu personel, yang meskipun lebih kecil dibandingkan negara seperti AS, tetap terlatih dan efektif. Negara ini aktif di Afrika, melawan ekstremis dan stabilisasi pemerintahan.

Prancis juga memiliki pasukan paramiliter, Gendarmeri Nasional, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penjagaan wilayah, serta Garda Nasional yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tambahan. Pada 2019, Prancis

memperkenalkan wajib militer untuk pemuda sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan. Sistem pertahanan Prancis didukung oleh industri domestik, mengurangi ketergantungan pada impor senjata, dan memiliki fokus pada pengembangan senjata nuklir sebagai deterrence, dengan sekitar 300 senjata nuklir yang umumnya diluncurkan melalui kapal selam atau bom udara.

Kebijakan pertahanan Prancis, sesuai Article L. 1111-1 du Code de la Défense, bertujuan melindungi wilayah dan penduduk dari agresi bersenjata serta berkontribusi pada keamanan internasional. Di bawah Presiden Charles de Gaulle, kebijakan berfokus pada kemandirian pertahanan dan pengembangan senjata nuklir sebagai deterrence. Pasca Perang Dingin, kebijakan beralih pada peningkatan persenjataan konvensional dengan penekanan pada stabilitas Eropa dan kepentingan ekonomi. White Paper 1994 mengidentifikasi potensi konflik dan kebutuhan respons militer. White Paper 2008 dan 2013 menekankan isu keamanan kontemporer dan integrasi dengan NATO, meski tetap mengutamakan kekuatan nuklir dan efisiensi militer. (France, 2013)

Diplomasi Pertahanan dalam Kerja sama Pertahanan Indonesia dan Perancis

Diplomasi pertahanan merupakan bentuk diplomasi yang berfokus pada pemanfaatan instrumen pertahanan negara untuk mencapai kepentingan nasional selama masa damai. Dalam pelaksanaannya, kapasitas dan kapabilitas militer menjadi penentu utama keberhasilan diplomasi ini. Mengingat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas pertahanan Indonesia, diperlukan peningkatan melalui kebijakan pembangunan pertahanan, salah satunya melalui *Minimum Essential Force (MEF)*. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memperkuat diplomasi pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Prancis. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia melalui kerjasama strategis dan transfer teknologi dengan negara mitra yang memiliki keunggulan di bidang pertahanan.

Pada tahun 2017, Indonesia dan Prancis menandatangani *Letter of Intent (LoI)* yang menandai langkah penting dalam memperdalam kerja sama pertahanan antara kedua negara. Dalam acara tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, sementara Prancis diwakili oleh Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian. Penandatanganan LoI ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan dalam bidang pertahanan dan meningkatkan dialog terkait isu keamanan

maritim yang mencakup pembajakan, eksploitasi sumber daya alam, kejahatan transnasional, dan konflik perbatasan. Melalui LoI tersebut, Indonesia dan Prancis sepakat untuk memperkuat kapasitas pertahanan masing-masing negara sebagai bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian dunia dan stabilitas kawasan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan kapasitas melalui pelatihan bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di wilayah atau negara yang menggunakan bahasa Prancis. Selain itu, kedua negara berupaya memperluas ruang lingkup kerja sama dari yang sebelumnya terbatas pada pendidikan dan pelatihan bersama menjadi kerja sama di bidang industri pertahanan, dengan harapan dapat memperkuat kapabilitas pertahanan kedua negara dan mendukung stabilitas regional. (Indonesia, 2017)

Pada Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis *Florence Parly* mengadakan pertemuan untuk merayakan 70 tahun hubungan bilateral antara kedua negara dan membahas pembentukan *Defense Cooperation Agreement* (DCA). Perjanjian ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama pertahanan dengan fokus pada beberapa aspek utama: peningkatan sistem alutsista TNI, pengembangan industri pertahanan Indonesia dalam konteks rantai produksi alutsista global, serta pelatihan dan pendidikan personel militer. Selain itu, DCA mencakup kolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, kerja sama intelijen dan penanggulangan terorisme, serta dukungan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan misi humaniter, terutama selama pandemi Covid-19. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan industri pertahanan Prancis yang memproduksi amunisi, jet tempur, kapal perang, radar, dan sistem avionik. Pertemuan ini bertujuan membangun kerjasama strategis dan memfasilitasi transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kemampuan teknologi dan efektivitas sistem pertahanan Indonesia. (Lousana, 2020)

Hasil perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Prancis mencakup beberapa kegiatan utama:

1. **Forum Dialog:** *Indonesian-French Defense Dialogue (IFDD)* diadakan setiap tahun untuk membahas kerja sama pertahanan. Pertemuan IFDD fokus pada dialog strategis, kerja sama militer, dan industri pertahanan, dengan penekanan pada isu regional dan Indo-Pasifik serta penguatan pelatihan bersama. (TNI, 2022)
2. **Pelatihan Gabungan Militer:** Indonesia dan Prancis terlibat dalam pelatihan militer gabungan seperti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), yang berfokus pada penanggulangan bencana dan bantuan humaniter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat diplomasi pertahanan dan kolaborasi di wilayah perairan. (Kurmala, 2018)
3. **Kerja Sama Alutsista:** Indonesia dan Prancis melakukan pembelian peralatan militer, termasuk jet tempur Eurofighter Typhoons, pesawat Airbus A400M, helikopter H225M, dan negosiasi untuk jet tempur Rafale serta kapal selam. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. (Indonesia, 2017)
4. **Kerja Sama Anti-Terrorisme:** Kerja sama ini dimulai dengan LoI yang ditandatangani pada Maret 2017 dan diperkuat oleh kunjungan Presiden Prancis François Hollande ke Jakarta. Fokusnya adalah pada strategi dan upaya penanggulangan terorisme, termasuk terorisme siber. (Harahap, 2017)

Kepentingan Nasional Indonesia

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis membawa manfaat signifikan bagi kedua negara, berlandaskan pada kepentingan strategis dan kebutuhan masing-masing. Bagi Indonesia, keuntungan utama dari kerja sama ini adalah pengembangan industri pertahanan domestik. Melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan pertahanan Prancis, Indonesia dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas industri pertahanannya. Ini mencakup kemampuan manufaktur pertahanan dalam negeri yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung modernisasi alutsista dan pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih. Misalnya, kerja sama dalam produksi pesawat terbang, helikopter, dan kapal selam tidak hanya meningkatkan kapasitas militer Indonesia tetapi juga memperkuat industri lokal. Di samping itu, dengan meningkatnya ketegangan di kawasan seperti Laut Natuna Utara, peningkatan kekuatan angkatan laut dan maritim Indonesia menjadi semakin penting. Prancis, sebagai mitra dalam kerja sama ini, membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan kedaulatan

maritim dan memastikan keamanan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan dan keamanan nasional Indonesia.

Secara keseluruhan, kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional dan keamanan global, dengan masing-masing negara mendapatkan manfaat yang sejalan dengan kepentingan strategis dan kebutuhan pertahanan mereka.

Buku Putih Pertahanan Indonesia menekankan pentingnya kerja sama bilateral di bidang pertahanan sebagai bagian integral dari diplomasi pertahanan. Diplomasi ini bertujuan untuk membangun saling percaya dan mencari solusi damai terhadap isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua negara. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif liberalisme dalam hubungan internasional, yang percaya bahwa kerja sama antar negara dapat mendorong perdamaian dan stabilitas global. Dalam hal ini, Prancis berperan sebagai mitra strategis kunci bagi Indonesia, menawarkan berbagai bentuk dukungan yang mencakup pengadaan teknologi dan alih teknologi.

Kerja sama ini termasuk pengadaan radar untuk TNI Angkatan Udara, peluru kendali untuk TNI Angkatan Laut, serta suku cadang untuk helikopter dan Véhicule de l'Avant Blindé (VAB) yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Dukungan ini memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia, meningkatkan kemampuan operasional dan kemandirian industri pertahanan domestik. Dengan melibatkan Prancis dalam berbagai aspek pengembangan dan pemeliharaan alutsista, Indonesia tidak hanya memperoleh teknologi canggih, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara. Melalui diplomasi pertahanan yang solid, kedua negara berupaya mengatasi tantangan keamanan bersama dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di tingkat regional dan global.

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan dengan Prancis antara tahun 2017 hingga 2022 meliputi sejumlah aspek strategis yang berdampak positif pada perekonomian dan pengembangan industri dalam negeri. Pertama, kerja sama ini memberikan peluang signifikan bagi peningkatan investasi dalam sektor industri pertahanan domestik. Melalui alih teknologi dan produksi bersama, Indonesia tidak hanya memperoleh peralatan militer mutakhir seperti jet tempur, helikopter, dan kapal selam,

tetapi juga mampu mengembangkan kapasitas manufaktur lokal. Investasi ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor industri pertahanan, yang penting untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. (Hutagalung, Josua, 2023) Kedua, diversifikasi sumber pengadaan alutsista menjadi keuntungan utama dari kerja sama ini.

Dengan membeli peralatan dari Prancis, Indonesia mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa negara pengadaan, yang sebelumnya banyak bergantung pada negara-negara seperti Amerika Serikat. Diversifikasi ini memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi dan peralatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, serta menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan fleksibilitas dalam pengadaan alutsista. Ketiga, kerja sama ini juga mendorong pengembangan teknologi dan penelitian serta pengembangan (research and development) dalam industri pertahanan Indonesia. Melalui transfer teknologi dan kolaborasi dalam proyek- proyek pengembangan, Indonesia dapat memperkuat kapasitas inovasi dan teknologi lokal. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing tetapi juga memperkuat kemampuan research and development nasional, yang merupakan fondasi penting untuk kemajuan industri pertahanan yang berkelanjutan.

Keempat, kemitraan dengan Prancis membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk dan teknologi pertahanan. Dengan memperkuat hubungan industri pertahanan, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan internasional. Ini juga menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan lokal di sektor pertahanan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, kerja sama dan alih teknologi membantu meningkatkan efisiensi anggaran pertahanan Indonesia. Dengan memperoleh peralatan yang lebih modern dan efisien dari Prancis, Indonesia dapat mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan efektivitas operasional. Pengelolaan anggaran pertahanan yang lebih baik dan optimasi sumber daya yang tersedia menjadi manfaat langsung dari kerja sama ini, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien untuk kebutuhan pertahanan. Keenam, peningkatan keamanan yang dihasilkan dari kerja sama pertahanan berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan memperkuat kapasitas

pertahanan dan kerjasama internasional, Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas regional, yang pada gilirannya berdampak positif pada iklim investasi dan kegiatan ekonomi. Stabilitas keamanan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan menarik bagi investor domestik dan internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, kerja sama pertahanan seringkali membuka pintu untuk kemitraan ekonomi jangka panjang yang lebih luas. Hubungan bilateral yang kuat dalam bidang pertahanan dapat memperkuat kerja sama di sektor-sektor lain, seperti perdagangan, investasi, dan teknologi, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, kerja sama pertahanan dengan Prancis memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, meliputi peningkatan investasi industri, diversifikasi sumber pengadaan, pengembangan teknologi, peningkatan ekspor, efisiensi anggaran, stabilitas ekonomi, dan kemitraan jangka panjang.

Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Prancis antara tahun 2017 hingga 2022 mencakup berbagai aspek strategis yang krusial untuk keamanan dan stabilitas nasional. Kerja sama ini dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan strategis yang tidak hanya memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia tetapi juga meningkatkan peran dan posisi Indonesia di tingkat regional dan global. Penguatan kapabilitas militer menjadi salah satu fokus utama dari kerja sama ini. Dalam upaya meningkatkan kemampuan alutsista, Indonesia berkomitmen untuk memperbarui dan memperluas armada militernya dengan peralatan canggih dari Prancis. Pembelian jet tempur Rafale, helikopter H225M, dan kapal selam merupakan contoh konkret dari langkah-langkah tersebut. Jet tempur Rafale, dengan kemampuannya dalam tempur udara yang superior dan kemampuan multirole, meningkatkan daya tempur Angkatan Udara Indonesia dan memberikan kemampuan strategis dalam menghadapi ancaman udara. Sementara itu, helikopter H225M, yang dilengkapi untuk misi transportasi dan pencarian serta penyelamatan, memperkuat fleksibilitas dan responsivitas Angkatan Bersenjata Indonesia dalam berbagai operasi. Kapal selam, di sisi lain, memperkuat kekuatan laut Indonesia, memberikan kemampuan yang lebih baik dalam menjaga dan mengamankan wilayah maritimnya. (Altmeyer, Cyril, 2017)

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis memberikan berbagai keuntungan strategis. Diversifikasi sumber alutsista dari Prancis mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu pemasok dan memberikan akses ke teknologi mutakhir. Alih teknologi dan transfer pengetahuan memperkuat industri pertahanan domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja.

Pelatihan militer dan perjanjian seperti LoI dan DCA memperkuat keamanan regional, terutama di Indo-Pasifik, serta menangani ancaman non-tradisional dan keamanan maritim. Kerja sama intelijen dan operasi militer meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengumpulan informasi dan respons terhadap ancaman seperti serangan siber dan terorisme. (Indonesia, 2022)

Pembelian kapal perang dan kapal selam dari Prancis memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayah perairan dan kebebasan navigasi. Pelatihan bersama juga memperbaiki interoperabilitas angkatan bersenjata dan koordinasi dalam misi internasional. Secara keseluruhan, kerja sama ini mendukung kepentingan pertahanan nasional Indonesia dan memperkuat posisinya di tingkat global.

KESIMPULAN

Penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis (2017-2022) dipicu oleh kebutuhan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan kompleks dan mencapai *Minimum Essential Force (MEF)*. Indonesia memilih Prancis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pertahanan melalui diplomasi pertahanan, dokumen kerja sama, forum dialog, serta program pendidikan dan pelatihan militer. Kerja sama ini diharapkan mendukung tujuan jangka pendek mencapai MEF pada 2024 dan jangka panjang menciptakan industri pertahanan mandiri. Meskipun hasil konkret mungkin belum sepenuhnya terlihat, kerja sama ini penting dalam meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, dengan kemajuan lebih jelas saat MEF tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Altmeyer, Cyril, and T. H. (2017). *Indonesia in Tentative Deal for Airbus A400M Military Planes*. Jakarta Globe. jakartaglobe.id/news/indonesia-tentative-deal-airbus-a400m-military-planes

- Armées, M. des. (2023). *Les Missions Du Ministère Des Armées*. Gouv.Fr. www.defense.gouv.fr/ministere/missions-du-ministere-armees.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (n.d.).
- Foi, S. le prononcé fait. (2002). *Lettre de M. Jacques Chirac, Président de La République, à Mme Megawati Soekamoputri, Présidente de L'Indonésie*.
- France, M. of D. of. (2013). *The French Whice Paper on Defence and National Ministry*.
- Harahap, L. (2017). *Indonesia-Prancis Sepakat Kerjasama Berantas Terorisme Siber* | Merdeka.com | Merdeka.com. Merdeka.Com. www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-prancis-sepakat-kerjasama-berantas-terorisme-siber.html.
- Hutagalung, Josua, et al. (2023). Strategi Pertahanan Indonesia Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 2, no. 3, 792–802.
- Indonesia, K. P. R. (2017). *Indonesia Dan Perancis Tandatangani Letter of Intent (LoI) Tentang Peningkatan Kerja Sama Pertahanan*. Kemhan.Go.Id. www.kemhan.go.id/2017/03/29/indonesia-dan-perancis-tandatangani-letter-of-intent-loi-tentang-peningkatan-kerja-sama-pertahanan.html
- Inodnesia, B. K. B. E. R. (2022). *Prancis Siap Meningkatkan Kerja Sama Strategis Dengan Indonesia Dan Negara Mitra Di Kawasan Indo-Pasifik - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Ekon.Go.Id. www.ekon.go.id/publikasi/detail/4530/prancis-siap-meningkatkan-kerja-sama-strategis-dengan-indonesia-dan-negara-mitra-di-kawasan-indo-pasifik
- Kurmala, A. (2018). *Dua Kapal al Prancis Peserta MNE Komodo 2018 Bersandar Di Tanjung Priok*. Antara News. www.antaranews.com/berita/703722/dua-kapal-al-prancis-peserta-mne-komodo-2018-bersandar-di-tanjung-priok
- Lousana, N. (2020). *Indonesia, France Aim to Sign Defense Cooperation before Year-End*. The Jakarta Post. , www.thejakartapost.com/news/2020/10/23/indonesia-france-aim-to-sign-defense-cooperation-before-year-end.html.
- PAL, P. (2019). *Kebijakan Modernisasi Alutsista Laut Berbasis MEF Tahap III*. Pal.Co.Id. www.pal.co.id/kebijakan-modernisasi-alutsista-laut-berbasis-mef-tahap-iii/#:~:text=Kebijakan MEF dimulai sejak tahun

- Rani Mardhika, et al. (2023). Kepentingan Indonesia Dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Perancis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, no. 04, 43–55.
<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.757>
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11, no. 1.
- TNI, P. P. (2022). *INDONESIA FRANCE DEFENCE DIALOGUE (IFDD) DI PMPP TNI – IAF PKC*. Pmpp-Tni.Mil.Id. pmpp-tni.mil.id/2022/10/21/indonesia-france-defence-dialogue-ifdd-di-pmpp-tni/
- Vincent, E. (2023). *France’s Defense Budget Paradox: More Money, Fewer Purchases*. Le Monde.Fr, Le Monde.
www.lemonde.fr/en/international/article/2023/04/10/france-s-defense-budget-paradox-more-money-fewer-purchases_6022326_4.html.